
| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Judul | : Komisi VII bicara pentingnya daya saing, UMKM masih hadapi kendala administrasi |
| Tanggal | : Senin, 29 Desember 2025 |
| Surat Kabar | : Rakyat Merdeka |
| Halaman | : 7 |

Komisi VII Bicara Pentingnya Daya Saing

UMKM Masih Hadapi Kendala Administrasi

ANGGOTA Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menilai, UMKM di Tanah Air saat ini telah memiliki daya saing dan potensi besar untuk tumbuh. Namun, perkembangan tersebut masih kerap terhambat lemahnya pendampingan, perizinan, serta pola pembinaan yang belum menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha.

Menurut Bambang, UMKM memegang peran strategis sebagai penopang perekonomian daerah, terutama di tengah tantangan ekonomi nasional. Sejak 2020, sektor ini terbukti mampu bertahan sekaligus berinovasi, sehingga patut mendapat apresiasi dan dukungan berkelanjutan.

Namun, ia menyoroti masih minimnya peran pemerintah daerah, khususnya di tingkat kecamatan, dalam mendampingi proses perizinan. Salah satu kendala yang sering muncul adalah lambannya penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

"UMKM punya produk yang bagus dan berdaya saing. Sayangnya, sering terhambat urusan administratif. Kecamatan harus

aktif mendampingi, bukan sekadar menunggu," ujar Bambang dalam keterangannya, Sabtu (27/12/2025). Ia menegaskan, PIRT merupakan syarat penting agar produk pangan UMKM dapat masuk ke pasar modern dan memperluas jaringan distribusi. Tanpa legalitas tersebut, pelaku usaha akan kesulitan berkembang meskipun kualitas produknya memadai.

Selain perizinan, Bambang juga menyoroti persoalan akses permodalan. Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah sebesar tiga persen dan plafon yang cukup besar. Karena itu, perbankan diminta menjalankan kebijakan tersebut sesuai aturan tanpa menambah syarat yang memberatkan.

"Untuk KUR hingga Rp 100 juta tidak boleh ada jaminan. Ketentuan ini harus benar-benar dipatuhi agar UMKM tidak takut mengakses pembiayaan," tegas politikus Partai Gerindra itu.

Sejalan dengan hal tersebut, anggota Komisi VII DPR Bane Raja Manalu mengkritisi pelaksanaan pelatihan UMKM yang



Bambang Haryo Soekartono

dinilai masih bersifat seremonial dan belum berdampak nyata. Ia menilai, banyak program pembinaan berhenti pada kegiatan formal tanpa pendampingan berkelanjutan.

"Sering kali pelatihan hanya datang, bertemu, kasih plakat, lalu pulang. Padahal UMKM membutuhkan pendampingan dari awal hingga produk benar-benar siap bersaing," ujar Bane.

Ia mencontohkan pentingnya pendampingan pada aspek

desain dan kemasan produk. Kualitas produk yang baik harus diiringi tampilan yang menarik agar memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar.

"Produknya enak, tapi kemasannya polos, tidak ada logo atau merek. Begitu kemasan diperbaiki, minat beli langsung meningkat," kata politikus PDIP itu.

Bane juga menyoroti rendahnya literasi administrasi pelaku UMKM yang menyebabkan banyak usaha tidak terdata dan sulit mengakses bantuan pemerintah. Ketakutan terhadap pajak, menurutnya, masih kerap muncul akibat minimnya pemahaman regulasi.

Ia mengungkapkan, banyak pelaku UMKM enggan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) karena khawatir terkena pajak. Padahal, UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun tidak dikenai pajak. "Ada pesan yang tidak tersampaikan dengan baik antara aturan dan pemahaman pelaku UMKM," ujarnya.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan, pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian untuk memperbaiki

pola pembinaan UMKM. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan yang lebih terstruktur dan terintegrasi.

Menurut Maman, optimisasi balai latihan kerja terstandarisasi di daerah menjadi instrumen penting dalam mencetak wirausaha baru. Namun, peningkatan rasio kewirausahaan nasional tidak bisa hanya bergantung pada pelatihan semata.

"Pelatihan hanyalah satu bagian. Harus dibarengi dengan akses pembiayaan, akses pasar, dan kemudahan perizinan," jelasnya.

Dalam pengembangan UMKM dan kewirausahaan, Kementerian UMKM juga menjalankan program Entrepreneur Hub. Program kolaboratif ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui peningkatan kapasitas, sehingga lahir wirausaha mandiri, inovatif, dan mampu membuka lapangan kerja.

"Entrepreneur Hub juga memperhatikan wirausaha tematik yang lahir dari beragam karakteristik, motif, dan bidang usaha," tandas Maman. ■ PYB